

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya iklim yang memungkinkan peraturan menjamin dan melindungi para pelaku ekonomi, melalui lembaga-lembaga yang mendukung dan menunjang operasional usahanya.

Usaha untuk meningkatkan perekonomian kita yang sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan dan pengembangan di bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan yang merata, dapat diwujudkan melalui kebijakan yang serasi antara lain di bidang perkreditan perbankan salah satunya menyelenggarakan kredit modal kerja.

Beberapa lembaga pendukung yang diperlukan khususnya, bank (lembaga keuangan) merupakan yang terpenting mengingat kemampuan-kemampuan atau potensi yang dimiliki lembaga keuangan ini, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kebijakan kredit, untuk menentukan bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha tersebut .
(Heffernan, 2005: 1)

Pemerintah suatu negara menginginkan suatu kemajuan dalam dunia usaha, oleh karena itu pemerintah melalui bank- bank harus dapat benar- benar membantu para pelaku ekonomi khususnya di bidang permodalan yang ada di negaranya, namun bukan berarti bahwa bank harus atau dapat mengabdikan begitu saja setiap

permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur/ perusahaan- perusahaan, sebab bagaimanapun juga bank harus tetap memperhatikan faktor- faktor yang menyangkut *safety, utility*, dan profitabilitas semua dana yang dimilikinya.

Pemberian kredit hanya dilaksanakan melalui sarana perbankan yang telah terorganisir dengan baik, mempunyai sistem serta prosedur yang sederhana dan memadai. Pemberian kredit hanya dapat dilaksanakan apabila bank mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari penerima kredit (debitur) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (**UU RI No.7, 1992: ps. 8**), sehingga pinjaman beserta bunganya dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Harta sangat besar tertanam dalam bentuk kredit, sehingga pendapatan bunga kredit merupakan komponen yang dominan dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya. Namun, sebaliknya bila dalam pelaksanaannya, tujuan dari kebijakan kredit yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan yakni memperoleh penerimaan dari pendapatan bunga kredit sering tidak dapat tercapai karena tingginya angka kredit bermasalah. Angka kredit bermasalah yang tinggi dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal dari bank tersebut (Muljono, 1991: 99).

Semakin banyaknya kredit bermasalah maka kondisi kesehatan bank tersebut semakin menurun. Hal ini mengakibatkan banyak dari bank tersebut harus membentuk cadangan/ penyisihan penghapusan aktiva produktif. Cadangan ini akan dipergunakan bilamana terjadi penghapusan kredit yang sudah lama macet dan debitur sudah dinyatakan tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya.

Berkurangnya cadangan akibat adanya penghapusan juga akan mengurangi modal yang dimiliki oleh bank.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu kebijakan dibidang perbankan khususnya yang berhubungan dengan perkreditan agar dapat mengurangi terjadinya kerugian bank akibat pemberian kredit. Salah satu bentuk dari kebijakan atas pemberian kredit adalah adanya prosedur pelaksanaan pemeriksaan intern.

Pemeriksaan intern adalah:

“Suatu kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam suatu organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen.”

(Mulyadi, 2002: 10)

Dalam melakukan pemeriksaan intern, diperlukan data-data yang lengkap dan benar, baik data keuangan maupun data non keuangan dari calon debitur. Untuk dapat mengetahui, apakah data tersebut dapat diyakini kebenarannya dan bukan fiktif, serta untuk melengkapi data yang belum didapat maka perlu adanya kunjungan ke lokasi proyek.

Berdasarkan dari semua data yang telah diperoleh, maka akan diketahui resiko-resiko yang akan timbul atas proyek pemohon bila kreditnya disetujui, disamping itu juga akan diketahui perkiraan jumlah kredit yang sebaiknya diberikan, serta jangka waktu pengembaliannya sampai kredit dinyatakan lunas. Pemberian

kredit sering menimbulkan *klaim* terhadap seseorang, bank pelaksana, dan dapat juga pegawai atau pejabat bank, karena macetnya suatu kredit pinjaman maupun bunganya tidak tepat waktu. Untuk menghadapi masalah tersebut maka dituntut adanya manajemen yang baik diantaranya adalah dengan menciptakan suatu struktur pengendalian intern yang memadai serta pengawasan dan penelitian secukupnya terhadap struktur pengendalian intern yang ada.

Struktur pengendalian merupakan suatu alat untuk menilai apakah pelaksana aktivitas perusahaan telah sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan serta merupakan pengawasan yang memadai, karena dengan adanya struktur pengendalian yang memadai dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam memberikan kredit yang mengakibatkan dana pinjaman menjadi kurang efektif, dan walaupun kesalahan tersebut terjadi juga, maka hal ini dapat segera diketahui dan selanjutnya segera diambil tindakan koreksi atau perbaikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas bahwa fungsi struktur pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat penting atas permohonan kredit yang dilakukan oleh bank dalam upaya memperkecil terjadinya kredit bermasalah agar tujuan untuk memperoleh laba dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemeriksaan intern mempunyai peranan dalam memantau dan mengarahkan administrasi perbankan, khususnya di bidang kredit.

Sejalan dengan pemeriksaan intern, peranan pemeriksaan intern tidak selalu menjamin mengatasi masalah tunggakan kredit, oleh karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada prosedur tersebut. Kelemahan seperti kelalaian manusia sangat mempengaruhi ketidaktepatan prosedur tersebut.

Dewasa ini banyak kasus mengungkap terjadinya kondisi kredit yang bermasalah bahkan sampai kepada kredit macet di dunia perbankan kita. Dari hal tersebut dapat diungkapkan bahwa peranan pemeriksaan intern belum dapat berperan dengan baik, atau dengan kata lain pemeriksaan intern yang ada kurang bekerja dengan efektif.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, penulis beranggapan bahwa peranan pemeriksaan intern atas pemberian kredit usaha kecil sangatlah penting bagi pihak bank agar dapat memperoleh laba yang optimal.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil masalah dalam skripsi ini dengan judul:

“Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Proses Pemberian Kredit. (Studi kasus pada Bank BNI Perintis, Bandung).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap efektivitas sistem pengendalian intern proses pemberian kredit.

2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan intern dibidang kredit, yang dilakukan suatu bank dengan didasarkan pada ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dan didukung oleh bukti- bukti yang benar dan cukup relevan.
3. Bagaimana cara menangani/ menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi pada suatu bank.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menunjukkan pengaruh dari peranan audit internal terhadap efektivitas sistem pengendalian intern proses pemberian kredit.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap efektivitas sistem pengendalian intern proses pemberian kredit.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan intern dibidang kredit, yang dilakukan suatu bank dengan didasarkan pada ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dan didukung oleh bukti- bukti yang benar dan cukup relevan.
3. Untuk menganalisis cara menangani/ menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi pada suatu bank.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis: hasil penelitian dalam bentuk sripsi ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universita Kristen Maranatha Bandung, dan hasil penelitian ini diharapka dapat memberikan manfaat dalam rangka memperdalam ilmu akuntansi khususnya dalam memperdalam peranan pemeriksaan internal dalam proses pemberian kredit pada sebuah bank.
2. Kegunaan Praktis (Operasional): dengan dilaksanakannya penelitian ini maka hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk kemudian melakukan perbandingan dengan apa yang selama ini telah dilakukan dan diterapkan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya khususnya dalam meningkatkan efektifitas pemberian kredit bagi para nasabahnya.
3. Bagi Para Peneliti Lanjutan: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan yang berguna bagi pihak- pihak yang berkepentingan.